

BAB II

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT *FIQH JINĀYAH*

A. Pencurian Dengan Kekerasan (*Hirabah*)

1. Pengertian *Hirabah*

Menurut *Abd al Qadir Audah* dan *al Sayid Sabiq* yaitu, *hirabah* dikenal dengan istilah pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini disebut juga dengan pencurian dengan kekerasan atau begal. Walaupun tindak pidana *hirabah* dinamakan pencurian besar (*sariqah kubra*), ia tidak benar-benar mirip dengan pencurian. Pencurian adalah keluar (rumah) untuk mengambil harta secara paksa.¹

Dalam istilah *syara'* merampok di sebut *qaṭ'uttariq* yang artinya “memotong jalan” atau “menjegal” atau di sebut *hirabah* yang artinya “peperangan”. Adapun secara istilah adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa, kekerasan, ancaman senjata, penganiayaan bahkan kadang kala dengan membunuh pemilik barang. Penyamun/ perampok/ pembajak adalah orang yang mengambil harta orang muslim atau non muslim (*mu'ahad*: non muslim yang terkait perjanjian dengan kaum muslimin) tanpa alasan yang benar, dengan cara paksa, atau menggagahi pemiliknya di suatu padang pasir atau tempat yang lain.

¹ Umar Shihab, Dkk, *Ensklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Karisma Ilmu), 77.

Ketiga istilah yaitu menyamun, merampok, membajak esensinya mempunyai arti sama yakni mengambil barang orang lain secara terang-terangan (si pemilik barang tahu), membawa senjata (kayu, batu, pisau, senjata api yang dapat di gunakan berkelahi). Bedanya hanya pada tempat dan suasana. Kalau nyamun di lakukan di tempat yang sunyi, tidak ada banyak orang. Kalau merampok di lakukan di tempat yang ramai. Misalnya di pasar, di rumah, mool, dan lain lain. Kalau membajak sasarannya adalah kendaraan besar. Misalnya di kapal terbang, di kapal laut dan sebagainya.²

Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan ulama Syi'ah Zaidiyah mendefinisikan hirabah adalah keluarnya seseorang untuk mengambil harta dengan cara kekerasan jika keluarnya menimbulkan ketakutan pengguna jalan, mengambil harta, atau membunuh seseorang . Sebagian ulama mendefinisikan *hirabah* adalah upaya menakuti-nakuti orang di jalan untuk mengambil hartanya. Dari sekian banyak definisi, disini pemakalah mencoba memahami bahwa yang dikatakan *hirabah* itu adalah upaya seseorang atau kelompok yang mengambil harta secara paksa (terang-terangan, atau menakuti-nakuti, membunuh, dan mengambil harta) yang menimbulkan kondisi tertentu (terganggunya keamanan).

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 69.

kekerasan.⁶ Sedangkan menurut buku *fiqh jinayah*, *hirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.⁷ Secara harfiah *hirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian mencuri.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan *jarimah* perampokan (*hirabah*) diantaranya :⁸

1. Pendapat Hanafiyah : perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang-orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan.
2. Pendapat Malikiyah : mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak.
3. Pendapat Syafi'iyah : mengambil harta / membunuh / menakut-nakuti yang dilakukan dengan senjata di tempat yang jauh dari pertolongan.
4. Pendapat Hanabilah : mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir menggunakan senjata.
5. Pendapat Zhahiriyyah : orang yang melakukan kekerasan, menakut-nakuti pengguna jalan, dan membuat onar/kerusakan di bumi.

⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*. (Radja Grafindo: Jakarta, 1404 H), 33.

⁷ Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 87.

⁸ Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah, (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 151-152.

2. Dasar-Hukum *Hirabah*

Dasar hukum tentang tindak pidana hirabah antara lain, berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاُ الَّذِينَ يُجَارُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ فِي الدُّنْيَا
وَهُمْ فِي الْأُخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*” (Q.S. Al-Maidah:33).⁹

Berdasarkan Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33, had penyamun, dan perompak adalah:

- a) Apabila mereka mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya dihukum mati, kemudian disalib.
- b) Apabila mereka membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati sebagaimana qishash.

⁹ DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pt Grafindo Persada, 2002), 22.

3. Syarat-Syarat *Hirabah* Yang Dapat Dijatuhi Hukuman

Untuk menjatuhi hukuman kepada pelaku *hirabah* terdapat beberapa syarat, yaitu:¹²

a. Pelaku *hirabah* Adalah Orang Mukallaf

Mukallaf adalah syarat untuk dapat ditegakkan suatu had padanya. Kemudian mukallaf adalah orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak dapat dianggap sebagai pelaku *hirabah* yang harus di had, meskipun ia terlibat dalam sindikat *hirabah*. Karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dibebani atau dihukum menurut syara.

b. Pelaku *Hirabah* Membawa Senjata

Untuk dapat menjatuhkan had *hirabah* disyaratkan pula bahwa dalam melancarkan *hirabah* pelakunya terbukti membawa senjata, karena senjata itulah yang merupakan kekuatan yang diandalkan olehnya dalam melancarkan *hirabah*. Bila pelaku tidak menggunakan atau membawa senjata maka tindakannya tidak bisa dikatakan *hirabah*. Abu Hanifah mengatakan bahwasannya tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat itu tidak di hukumi sebagai tindakan *hirabah*.

c. Lokasi *Hirabah* Jauh Dari Keramaian

¹² Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 89-90.

Dengan istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirabah* (pencurian dengan kekerasan), ke dalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *al-Mâidah* ayat 38. Dalam pelaksanaan hukuman potong tangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: barang yang dicuri merupakan barang berharga (yang mempunyai nilai), tidak ada keraguan dalam kepemilikan barang tersebut, barang tersebut mencapai harga minimal yang telah ditentukan, tidak ada *syubhat* (keraguan). Ulama berselisih pendapat tentang nilai barang yang pencurinya berhak mendapat hukuman potong tangan. Imam Malik mengukur *nishab* sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih, sedang imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *nishab* pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar. bahwa barang tersebut benar-benar bukan barang milik pencuri, ketika dicuri barang tersebut harus berada di tempat yang aman.¹³

Dalam undang-undang pidana di Mesir sebagaimana undang-undang perdata disesuaikan dengan enam bahasan yang muncul dalam khazanah fiqh:

¹³Al-'Asymawi, Syariat: *Kodifikasi Hukum Islam* dalam Charles Kurzman (*et. al.*), *Islam Liberal*, terj. Bahrul 'Ulum (*et. al.*), (Jakarta: Paramadina, 2001), 39.

pencurian (*al-sariqat*), menuduh berbuat nista (*al-qadzaf*), perampokan (*qath' altharîq*), perzinahan (*al-zinâ*), minuman keras (*al-khamr*) dan kemurtadan (*alriddat*). Bahkan sebagian ulama mensyaratkan adanya pengulangan dalam pencurian. Sebagian ulama yang lain mensyaratkan bahwa pencurian itu terjadi bukan karena terpaksa, jika terpaksa maka ia tidak berhak untuk dikenakan hukuman potong tangan.

Sebagaimana yang terjadi pada masa 'Umar yang menolak menerapkan hukum potong tangan pada pencuri unta, karena beliau mengetahui bahwa mereka mencuri karena terpaksa dan sekedar menutupi kebutuhan perut mereka.¹⁴ Karena itu, dalam hukum Islam, sanksi atas pencurian (potong tangan), tidak berlaku bagi orang yang kelaparan, tuna sandang, ataupun mereka yang justru butuh bantuan. Sebenarnya definisi pencurian yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah tersebut terlampau singkat dan kurang lengkap.

Menurut al-Asymawi, ketentuan sanksi hukum (*hudud*) dalam Islam tersebut, disyaratkan dengan menyiapkan dan mendidik masyarakat terlebih dahulu agar menjadi manusia yang terpercaya, adil dan bertakwa. Pendidikan itu penting untuk menjamin agar sanksi-sanksi tersebut tidak diterapkan secara salah, dengan kesaksian yang bohong, ataupun sistem peradilan yang tidak

¹⁴ Al-'Asymawi, *al-Syariat al-Islamiyyat wa al-Qanun al-Masry*, (Kairo: Madbuli, 1996), 118.

sesuai dengan hukum Islam.¹⁵ ‘Asymawi menyebutkan bahwa ajaran Islam sebenarnya lebih dari sekedar penerapan sanksi-sanksi. Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syarat maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman yaitu:

1) Pengganti kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersamaan. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.¹⁶ Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan hukuman untuk mengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama.¹⁷ Alasan bahwa Al-Quran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.

2) Hukuman potong tangan

¹⁵ Al-Asymawi, Al-‘Asymawi, "Syari' at: *Ushul al-Syarrat*, (Kairo: Madbuli, 1983),15.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), 7-8.

¹⁷ Abu Hanifah, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), 170.

pencurian. Akan tetapi karena biasanya *jarimah* pencurian dengan kekerasan dikerjakan di jalan-jalan umum yang jauh dari keramaian maka pencurian dengan kekerasan pada umumnya yakin akan keberhasilan perbuatannya dan keamanan dirinya. Kondisi yang seperti itulah yang menjadi penguat faktor kejiwaan yang menimbulkan perbuatan jarimah dan yang mengalahkan faktor kejiwaan yang menjauhkannya. Oleh karena itu hukuman harus diperberat agar kedua faktor tersebut dapat seimbang.

Hukuman untuk tindak pidana perampokan ini sama dengan hukuman pencurian dua kali. Pelipatan hukuman disini adalah adil, karena bahaya perampokan lebih besar daripada bahaya pencurian biasa dan kesempatan untuk meloloskan diri lebih banyak daripada kesempatan dalam pencurian biasa.

4.) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan dikenai apabila si pencurian dengan kekerasan hanya menakut-nakuti orang-orang yang lewat di jalan, tetapi tidak mengambil harta benda dan tidak pula membunuh. Alasan penjatuhan hukuman ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pencurian dengan kekerasan tersebut dimaksudkan untuk mencari popularitas nama dan diri mereka. Itulah sebabnya mereka itu diasingkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan popularitas mereka.

Di samping itu mungkin saja perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mengganggu keamanan di jalan-jalan umum di suatu negeri dan untuk mengimbanginya, ia dihukumi dengan jalan meniadakan keamanan dirinya dari semua bagian negeri tersebut. Baik alasan itu tepat atau tidak, namun yang jelas dalam hal ini faktor psikologis ditandai dengan faktor psikologis pula. Adapun cara dan lamanya pengasingan menurut para fuqaha sama dengan hukuman pengasingan yang berlaku untuk *jarimah* zina. Adapun pengklasifikasian jenis sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, para ulama berbeda pendapat.